

## **ANALISIS KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA SEBAGAI UPAYA MENJAGA STABILITAS KAWASAN TIMUR TENGAH**

**Rayhan Fasya Firdausi**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email : rayhanfasyafirdausi@gmail.com

**Iksan Maulana**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: iksanmaulana008@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tiongkok sendiri banyak bergantung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, secara umum dan khusus. Secara umum, Tiongkok banyak bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Palestina sebagai mitra diplomatik. Secara khusus, Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi di kawasan tersebut. Memang, Tiongkok sudah mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Mao Zedong. Dukungan ini menjadi senjata sekaligus motif bagi Tiongkok. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji kepentingan-kepentingan Tiongkok. Keputusan Tiongkok tidak lepas dari peran aktor rasionalnya, yaitu pemimpin negara Tiongkok, Presiden Xi-Jinping dan tim yang berkaitan dengan politik luar negeri Tiongkok. Penulis menggunakan teori pengambilan keputusan dengan model aktor rasional untuk mengkaji kepentingan-kepentingan ini. Penelitian ini menemukan tiga kepentingan utama Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan Palestina: mengamankan pasokan impor minyak, menjalankan *Belt and Road Initiative*, dan merebut hegemoni dunia dari Amerika Serikat. Semua itu bermuara pada satu tujuan: menjaga kawasan Timur Tengah demi meningkatkan eksistensi dan popularitas Tiongkok di mata dunia internasional.

Kata kunci: Kepentingan, Tiongkok, Palestina, Timur Tengah, Rasional

### **ABSTRACT**

*This article aims to analyze China's interests in supporting Palestinian independence. China depends a lot on countries in the Middle East region, in general, and specifically. China generally collaborates with countries in the Middle East region, including Palestine as a diplomatic partner. In particular, China has economic interests in the region. Indeed, China has supported Palestinian independence since the time of Mao Zedong. This support is both a weapon and a motive for China. This research used a qualitative descriptive analysis method to examine China's interests. China's decision cannot be separated from the role of its rational actors, namely the Chinese state leader, President Xi-Jinping, and the team related to China's foreign policy. The author uses decision-making theory with a rational actor model to examine these interests. This research finds China's three main interests in supporting Palestinian independence: securing oil import supplies, implementing the Belt and Road Initiative, and seizing world hegemony from the United States. It all boils down to one goal: protecting the Middle East region to increase China's existence and popularity in the eyes of the international world.*

*Keywords: Interests, China, Palestine, Middle East, Rational*

## **PENDAHULUAN**

Pembaca tentu sudah banyak mendengar pembicaraan mengenai konflik Israel-Palestina. Perang ini terus berlanjut hingga saat ini. Kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari Jalur Gaza, yang tampaknya merupakan pembalasan atas kejahatan Israel di masa lalu. *Al-Aqsa Flood Operation* menerobos tembok perbatasan Gaza-Israel pada 7 Oktober 2023, memaksa masuk melalui perbatasan Gaza melintasi pemukiman yang berdekatan dan instalasi militer Israel. Sejak Perang Arab-Israel tahun 1948, perang ini merupakan yang pertama kali terjadi langsung di wilayah Israel. (Zack Beauchamp, 2023) Pemerintah Israel terdorong untuk mengumumkan situasi darurat pasca serangan Hamas ini karena setidaknya 3.000 roket ditembakkan dari Jalur Gaza ketika militan Hamas menerobos perbatasan dan memasuki Israel yang menewaskan sedikitnya 900 warga Israel. (South China Morning Post, 2023) Israel secara resmi mendeklarasikan perang yang dinamai *Iron Swords* untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur tahun 1973, yang terjadi hampir tepat lima puluh tahun sebelum serangan tahun 2023. (South China Morning Post, 2023) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel "sedang berperang" dalam pidato nasionalnya setelah dimulainya serangan. (Bethan McKernan, 2023)

Hamas dan Israel tidak tinggal diam, aksi saling menyerang tak terelakkan lagi. Teroris asal Palestina yang menerobos masuk ke Israel membobol sejumlah tempat pemukiman di Israel disebut kibbutzim di dekat Jalur Gaza dan kota Sderot. Media Israel dan Palestina melaporkan bahwa militan Palestina telah menculik tentara Israel dan warga sipil, termasuk anak-anak; dilaporkan beberapa sandera telah diangkut ke Jalur Gaza. (Ynet News, 2023) Menanggapi invasi tersebut, Israel menembaki sasaran militer dan bangunan strategis. Ada 20 contoh penembakan infrastruktur sipil yang terdokumentasi, termasuk rumah, bank, masjid, dan rumah sakit. Israel telah menewaskan sedikitnya 500 warga Palestina dalam baku tembak dan serangan udara di Gaza dan Israel, termasuk warga sipil, 78 anak-anak, dan 41 wanita, menurut Kementerian Kesehatan Palestina yang dipimpin Hamas di Gaza. (Ynet News, 2023)

Perang ini memicu reaksi dari berbagai petinggi negara. Dunia terbelah menjadi dua kubu: pro Kemerdekaan Palestina dan pro pembelaan diri Israel. Mayoritas negara yang mendukung Israel mengklaim bahwa hal ini karena Israel berhak membela diri terhadap serangan yang dipimpin Hamas. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden AS, Joe Biden mengatakan bahwa Israel telah menjadi penjaga utama keamanan Yahudi di seluruh dunia selama 75 tahun, memastikan bahwa tragedi sejarah tidak akan terjadi lagi. Dia mengklaim bahwa AS mendukung Israel. (The White House, 2023) Perdana Menteri Inggris mengecam serangan Hamas terhadap Israel sebagai sesuatu yang "benar-benar

mengerikan," seperti yang diutarakan AS. Setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rishi Sunak menyatakan bahwa Inggris akan siap mendukung Israel. Dukungan Inggris terhadap Israel memang diperlukan; mereka telah menjadi salah satu sekutu terkuat Israel dalam mempertahankan haknya untuk membela diri dan dalam menyediakan senjata yang dibutuhkan Israel untuk mengusir serangan Hamas. (VOA Indonesia, 2023b)

Indonesia dan Rusia adalah contoh negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, pembentukan negara Palestina adalah cara yang dapat diandalkan untuk mewujudkan perdamaian di mana Palestina hidup berdampingan dengan Israel. Selain itu, dia mengatakan bahwa Rusia sangat prihatin dengan cara Barat memperlakukan Israel. Lavrov menambahkan bahwa upaya akan dilakukan oleh Rusia dan Liga Arab untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan Israel. (CNN Indonesia, 2023) Presiden Joko Widodo dari Indonesia mengecam serangan di Gaza, Palestina, dengan alasan meningkatnya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta kesengsaraan mereka. Selain itu, penyerangan Israel terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli juga dikecam oleh Presiden Jokowi karena melanggar hukum humaniter internasional. Karena itu, Presiden menyatakan telah memberikan instruksi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi untuk mengevakuasi WNI di Gaza dan menghadiri pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendesak para pemimpin dunia untuk menjalin persatuan internasional agar dapat menangani masalah Palestina secara adil dengan berpegang pada pedoman internasional yang telah ditetapkan. (Humas Setkab RI, 2023)

Salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina adalah Tiongkok. Meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara Palestina dan Israel sangat mengkhawatirkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yang meminta semua pihak terkait untuk "tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusuhan untuk melindungi warga sipil dan menghindari memperburuk situasi." (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2023) Selain itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan bahwa "hukuman kolektif" terhadap rakyat Palestina harus dihentikan dan bahwa akar konflik "terletak pada kenyataan bahwa keadilan belum ditegakkan terhadap rakyat Palestina". (Tommy Patrio Sorongan, 2023)

Tiongkok punya alasan khusus untuk mendukung Palestina. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Palestina sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Kebijakan luar negeri Mao Zedong telah membantu gerakan pembebasan nasional Dunia Ketiga, khususnya Palestina, sejak masanya. Tiongkok terus mendukung Organisasi Pembebasan Palestina di forum internasional setelah jatuhnya Mao. Pada tahun 1988, Tiongkok secara resmi mengakui Negara Palestina. Tiongkok dan Israel telah

menjalin hubungan positif sejak Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara pada tahun 1992. Dalam kapasitas resmi mereka, pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan Yasser Arafat melakukan perjalanan ke Tiongkok. Tiongkok secara resmi mendukung pembentukan "negara Palestina yang berdaulat dan merdeka" berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak memandang Hamas sebagai kelompok teroris. (Tommy Patrio Sorongan, 2023)

Perlu diingat bahwa Tiongkok sedang berkolaborasi dengan negara-negara di Timur Tengah dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sangat besar. Tiongkok juga mengimpor minyak dari Timur Tengah. Saat ini, Tiongkok mengimpor banyak minyak dari luar negeri; Para analis menghitung bahwa setengah dari impor Tiongkok berasal dari negara-negara Teluk. Sebagai pilar kebijakan luar negeri dan ekonomi Tiongkok, Timur Tengah semakin berkontribusi terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok. (Brookings Doha Center, 2019) Di samping itu, kita juga perlu mengingat bahwa Tiongkok masih memiliki rivalitas dengan Amerika Serikat yang terang-terangan ada di balik Israel. Tentu saja, Tiongkok ingin terlihat lebih superior dibandingkan dengan Amerika Serikat. Melalui keterlibatannya dalam menyelesaikan perang Israel-Palestina, tentu saja ini akan meningkatkan reputasi Tiongkok dan semakin dilirik dunia.

Keputusan Tiongkok untuk mendukung Palestina tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan negara tersebut. Teori *decision making* dapat diterapkan dalam hal ini. Dinamika politik internasional dapat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan suatu negara dalam hubungan internasional. Para pengambil keputusan seringkali harus mengambil keputusan secara cepat sesuai dengan norma, pedoman, dan perilaku yang telah ditetapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, baik besar maupun kecil. Salah satu aspek pengambilan keputusan politik adalah distribusi nilai-nilai publik yang otoritatif. Kepemimpinan politik yang bertanggung jawab sering kali berkisar pada perlunya distribusi nilai-nilai bersama secara sengaja dan sadar, yang menurut para pemimpin adalah demi kepentingan terbaik masyarakat. Namun, konsep biaya peluang terlibat dalam distribusi yang disengaja ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya menurun seiring dengan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsekuensinya, pengambilan keputusan adalah proses memikirkan pilihan-pilihan dan memilih salah satu dari pilihan-pilihan tersebut.

Melalui proses pengambilan keputusannya, perilaku suatu bangsa dalam hubungan internasional dapat dipahami. Tingkat kemandirian suatu negara dapat dinilai dengan melihat seberapa banyak keputusan yang diambil merupakan hasil dari kepemimpinannya yang mengambil keputusan tanpa

pengaruh, dibandingkan dengan seberapa besar keputusan atau tindakannya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Negara harus mempertimbangkan struktur dan parameter pengambilan keputusan baik dalam faktor internal maupun eksternal. (Snyder et al., 2002) Faktor internal mencakup hal-hal seperti kekuatan nasional, lokasi geografis, opini publik, sikap publik, dan politik dalam negeri. Hal ini juga mencakup hal-hal seperti bagaimana masyarakat terstruktur dan beroperasi. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang terjadi di luar batas suatu negara, seperti tindakan dan respon negara lain serta intervensi dari organisasi regional dan internasional. (Snyder et al., 2002)

Aktor negara menggunakan berbagai model khusus ketika mengambil keputusan. Model aktor rasional adalah salah satunya. Secara umum, tradisi positivis dalam ilmu-ilmu sosial sangat bergantung pada rasionalitas. Hal ini memberikan kerangka teoritis yang memfasilitasi perumusan klaim yang dapat digeneralisasikan dan, dalam situasi tertentu, penilaian prediktif. Hal ini juga menginformasikan pendekatan pemecahan masalah dalam studi politik. Beberapa disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, ekonomi, psikologi, dan sosiologi, memiliki pendukung yang mengadopsi versi berbeda dari metodologi ini. (Kahler, 1998) Model aktor rasional menggunakan rasionalitas sebagai metodologi. Salah satu metode normatif untuk mengkaji pengambilan keputusan dalam situasi berisiko adalah model aktor rasional. Studi ilmiah tentang keputusan yang dibuat oleh individu rasional dan entitas kolektif didasarkan pada konsep seperti "optimasi" (yang kemudian diubah menjadi "maksimalisasi") atau "utilitas", yang menawarkan motivasi yang disengaja untuk tindakan yang menjelaskan perilaku dan hasil. (Alden, 2017)

Para ahli dalam model aktor rasional mengkarakterisasi dilema pilihan yang dihadapi pengambil keputusan sebagai salah satu antara sejumlah preferensi berbeda yang disusun berdasarkan hasil utilitas yang diharapkan. Model ini mewakili pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Para ahli teori pilihan rasional melihat keputusan-keputusan ini sebagai representasi akurat dari kondisi operasional yang mendorong perilaku sosial, meskipun faktanya keputusan tersebut bergantung pada pengetahuan dan harapan individu dan kelompok. Model ini merupakan instrumen luas yang dapat diterapkan secara luas pada upaya manusia dalam setiap aspek kehidupan, karena pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang selalu harus dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun dalam negara. Pemerintah menemukan bahwa model pilihan rasional memberi mereka landasan penafsiran yang baik secara kuantitatif untuk menciptakan kebijakan publik yang sekaligus memenuhi komitmen normatif untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut agar lebih sesuai dengan preferensi pemilih mereka. Hal ini terutama terjadi ketika para akademisi secara aktif mengaitkan rangkaian preferensi individu dengan prospek perbaikan program kebijakan. (Alden, 2017)

Pejabat negara digambarkan sebagai aktor yang logis dalam skenario ini. Menurut Afitonan, pengambil keputusan harus mampu memperkirakan hasil dan menentukan nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil karena mereka adalah aktor yang terampil dan rasional. Mengingat kewenangannya atas aparatur negara, para pemimpin negara tentu memiliki banyak informasi yang dapat mereka gunakan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Pemimpin negara juga diharapkan bersikap stabil, sehingga memungkinkan mereka bertindak tanpa prasangka dan obyektif. Meskipun demikian, hal inilah yang membatasi penggunaan model aktor rasional. Model ini bergantung pada informasi; namun, dalam situasi tertentu, keputusan harus diambil dengan cepat sementara informasi yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menjadi rentan jika pengetahuan yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk mengambil keputusan yang bijak. Namun, pengambilan keputusan dikhawatirkan tidak sepenuhnya obyektif selama pemimpin negara yang mengambil keputusan adalah manusia dan komponen psikologis tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari analisis para pengambil keputusan. (Afinotan, 2014) Maksimalisasi utilitas adalah tujuan akhir pengambilan keputusan kebijakan luar negeri aktor rasional dalam konteks hubungan internasional. Hal ini dicapai dengan memprioritaskan tujuan kebijakan luar negeri dan memilih cara yang paling hemat biaya untuk mencapainya. (Alden, 2017) Model aktor rasional akan menggambarkan peran pemimpin negara sebagai pengambil keputusan dalam proses penetapan keputusan kebijakan luar negeri.

Dalam tujuan-tujuan tertentu, aktor negara Tiongkok yaitu Presiden Xi-Jinping pasti bertindak dengan pemikiran yang rasional untuk mengambil sikap atas kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya. Termasuk dalam hal memberikan dukungan kepada Palestina, Tiongkok mempertimbangkan sejumlah kepentingan tertentu yang menyangkut hubungan bilateral antar kedua negara dan kepentingan-kepentingan lainnya di kawasan Timur Tengah. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kepentingan dibalik dukungan Tiongkok terhadap kemerdekaan Palestina. Melalui artikel ini, akan dapat dilihat tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dan kepentingan apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan dari dukungan tersebut serta bagaimana pertimbangan aktor rasional Tiongkok dalam melindungi kepentingan negaranya.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk menggambarkan secara akurat dan metodis fakta dan ciri objek dan subjek yang diteliti, maka dipilih metode deskriptif. Pendekatan ini berupaya memahami fenomena seperti perilaku, motivasi, dan tindakan yang terjadi dalam objek penelitian. Sementara itu, sebagian besar data yang diolah dengan metode ini berasal dari dokumen dan pernyataan resmi negara, wawancara dan pernyataan para pemimpin negara, serta

pemberitaan tentang kebijakan tertentu. Sedangkan penelitian ini mengumpulkan sumber data sekunder melalui pendekatan studi kepustakaan atau literatur. Informasi yang digunakan untuk mengolah data berasal dari berbagai sumber, antara lain website, buku, artikel, jurnal, surat kabar online, dan sumber relevan lainnya. Deskripsi data sekunder berbasis kalimat yang dikumpulkan dari beragam karya sastra kemudian dirangkai menjadi sebuah artikel untuk diwacanakan. (Sugiyono, 2013)

Dalam artikel ini, data yang dikumpulkan adalah data-data literatur dan berita yang berkaitan dengan dukungan Cina terhadap Palestina, hubungan diplomatik kedua negara, hasil wawancara dan statement para petinggi negara termasuk perdana menteri dan jajarannya. Keseluruhan data dikumpulkan secara online. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode tinjauan pustaka untuk memastikan isi informasi dari setiap data yang didapatkan.

## **PEMBAHASAN**

Keputusan Tiongkok mendukung kemerdekaan Palestina sebenarnya adalah upaya mengambil momentum untuk meningkatkan pengaruhnya melalui diplomasi yang telah dibangun bersama negara-negara di Timur Tengah. Xi Jinping mencoba untuk memposisikan negaranya sebagai aktor perdamaian yang efektif diantara kedua negara yang sedang berkonflik yaitu Israel dan Palestina. Kehadiran Tiongkok di Timur Tengah juga secara signifikan mendorong peningkatan ekonomi, politik, keamanan serta mitra dagang yang menguntungkan bagi kawasan tersebut. Kehadiran Tiongkok dalam kawasan tersebut dilatarbelakangi karena kepentingan untuk mendapatkan pasokan minyak Timur Tengah. Pasalnya, Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia yang sedang mengalami gejotan pasokan minyak asing untuk memenuhi pemenuhan industrinya dan pemenuhan keamanan energi bagi pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat dengan mengandalkan sekitar 72% untuk kebutuhan pasokan minyak. (Syafriani & Kusuma, 2019)

Selain itu, kawasan Timur Tengah bagi Tiongkok merupakan sebuah posisi yang sangat strategis untuk memajukan proyek besar yang sedang digagas oleh Xi Jinping yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI). Pasalnya, Timur Tengah menjadi kawasan yang terletak di persimpangan Asia, Eropa, dan Afrika, sekaligus menjadi tuan rumah jalur perdagangan maritim penting, seperti Suez, Mandeb, dan Hormuz. Kawasan ini berfungsi sebagai penghubung penting antara Timur dan Barat, memfasilitasi komunikasi antara Samudera Atlantik dan Samudera Hindia, serta memiliki kepentingan strategis dalam urusan global, ekonomi, dan diplomatik. (Chen et al., 2023)

Kuatnya kepentingan Tiongkok melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) yang telah terkonsep secara matang oleh Presiden Xi Jinping, memberikan Tiongkok keuntungan untuk memperluas pengaruhnya dalam merebut hegemoni Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari

adanya pergeseran maupun diversifikasi keamanan serta kemitraan strategis negara-negara Timur Tengah yang sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Diketahui beberapa peristiwa penting yang terjadi di Timur Tengah selalu melibatkan kehadiran Tiongkok sebagai pihak yang ikut terlibat, seperti saat terjadinya rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh Tiongkok, peningkatan nilai perdagangan minyak dan keamanan Arab Saudi dengan Tiongkok, dibukanya kembali kedutaan besar Riyadh dan Teheran di Tiongkok maupun sebaliknya, dan mendorong pengakhiran perang yang ada di Yaman, sampai puncaknya di akhir tahun 2023, terdapat dorongan untuk melakukan pertemuan perdamaian yang ditenggarai oleh Xi Jinping dan disambut baik oleh negara-negara Timur Tengah dalam menangani konflik Palestina-Israel serta mendukung negara Palestina untuk merdeka dan meraih kembali hak-hak nya.

### **Langkah-Langkah Konkrit Dukungan Kemerdekaan Palestina Oleh Tiongkok**

Tiongkok memiliki sejarah panjang dan telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini terlihat pada konflik Gaza tahun 2008-2009, ketika Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, dengan tegas mendesak Israel untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui dialog dan penggunaan diplomasi. (Aljazeera, 2016) Dukungan terus dilanjutkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Ma Zhaoxu mengemukakan keras Israel setelah serangan armada Gaza pada tanggal 31 Mei 2010, dan mendesak negara tersebut untuk secara serius melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dan memperbaiki situasi di Jalur Gaza dengan mencabut blokade. Cina juga mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang membahas pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Jalur Gaza. (CNN Indonesia, 2018)

Ketika Presiden Xi Jinping mengangkat diskusi tentang dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, dukungan Tiongkok terhadap kemerdekaan Palestina menjadi semakin jelas. Xi menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Arab di Beijing pada tahun 2018 bahwa prioritas utamanya pada saat itu adalah menjaga agar konflik tidak menyebar dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius di Palestina. Cara mendasar untuk menyelesaikan konflik Palestina, menurut Xi, adalah dengan menerapkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina dengan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan mencapai hidup berdampingan secara damai. (CNN Indonesia, 2018) Tiongkok juga telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Bantuan ini termasuk 2 juta dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan darurat yang diberikan oleh Otoritas Palestina dan badan-badan PBB, serta 15 juta dolar AS dalam bentuk pasokan kemanusiaan darurat yang dikirim ke

Jalur Gaza melalui Mesir. Tiongkok telah menggunakan hak presidensi bergilirnya di Dewan Keamanan PBB untuk memfasilitasi implementasi resolusi tersebut, yang menyerukan perpanjangan jeda dan koridor kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan penyediaan bantuan kemanusiaan. (Antarnews, 2023) Hal ini secara konsisten ditunjukkan oleh Tiongkok, hingga pada tahun 2023, ketika Xi menegaskan kembali dukungan negaranya untuk kemerdekaan Palestina dengan menyerukan penyelesaian Palestina yang adil.

Pada KTT Arab-Tiongkok yang diselenggarakan bulan Desember 2022, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa ketidakadilan historis telah dilakukan terhadap rakyat Palestina, yang tidak boleh diabaikan tanpa batas waktu. Beliau percaya bahwa hak dan kepentingan sah suatu negara tidak boleh diperdagangkan, dan bahwa permintaan untuk sebuah negara merdeka tidak boleh ditolak. Jadi, dalam hal dukungan konkretnya untuk Palestina, Xi mengusulkan tiga poin: terciptanya sebuah negara Palestina yang merdeka dengan kedaulatan penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya; memenuhi kebutuhan ekonomi dan mata pencaharian warga Palestina; dan mempertahankan momentum perundingan damai. (Ferida, 2023)

Selain itu, Presiden Republik Rakyat Tiongkok juga menjanjikan paket pinjaman senilai US\$20 miliar dan bantuan keuangan senilai US\$106 juta untuk sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Palestina. Bantuan ini merupakan bagian dari model "minyak dan gas plus" untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilanda perang. Tiongkok juga telah memberikan bantuan militer dalam perjuangan kemerdekaan Palestina, dengan menempatkan enam kapal perangnya di wilayah tersebut untuk melindunginya dari dampak perang yang lebih besar. Tiongkok menempatkan angkatan lautnya yang ke-44, yang sebelumnya telah melakukan latihan bersama dengan Oman, demikian menurut South Tiongkok Morning Post (SCMP) dan Sputnik. Kapal perusak berpeluru kendali tipe 052D, fregat Jingzhou, dan kapal suplai terintegrasi Qiandaohu merupakan bagian dari armada tersebut. (CNN Indonesia, 2018)

Serangkaian data yang telah penulis sajikan di paragraph sebelumnya menunjukkan langkah-langkah konkrit Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Langkah-langkah tersebut berupa bantuan-bantuan diplomatis Tiongkok, pernyataan-pernyataan presiden Xi yang selalu memberikan dukungan terhadap Palestina dalam berbagai pertemuan forum internasional, serta arah kebijakan Tiongkok yang memiliki kepentingan strategis terkait *Belt and Road Initiative* terhadap kawasan Timur Tengah termasuk Palestina. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa negara tirai bambu tersebut dalam mengupayakan pengembalian hak-hak warga Palestina yang dirampas dan telah melakukan upaya konkrit sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

Dukungan kemerdekaan Palestina yang diberikan oleh Tiongkok berkorelasi dengan kepentingan Tiongkok dalam memberikan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini menjadi salah satu bagian dari strategi untuk menjaga agar proyek-proyeknya di wilayah tersebut tetap berjalan lancar. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa konflik di wilayah tersebut dapat menghambat atau merugikan proyek-proyek ekonomi dan bisnis Tiongkok di Timur Tengah. Seperti yang diketahui, bahwa Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya secara global melalui inisiatif-inisiatif seperti proyek *Belt and Road Initiative* yang mencakup proyek-proyek infrastruktur dan investasi di banyak negara, termasuk Timur Tengah. Konflik yang terus berkepanjangan di kawasan Timur-Tengah dapat menciptakan ketidakpastian politik dan keamanan, yang mempengaruhi kelancaran proyek-proyek tersebut. Namun di sisi yang lain, tujuan geopolitik Tiongkok dapat tercermin dalam berbagai faktor politik, diplomatik, dan ideologi dalam dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Tiongkok juga memiliki serangkaian ketergantungan terhadap kawasan Timur Tengah.

### **Timur Tengah Sebagai Pemasok Minyak ke Tiongkok**

Tiongkok merupakan negara yang bergantung pada impor minyak dari negara lain, khususnya Timur Tengah. Tiongkok bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, sehingga Tiongkok mempunyai kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Sementara itu, ketika mereka berupaya memperluas hubungan ekonomi dan keamanan, negara-negara Timur Tengah mulai memahami betapa menariknya prinsip non-intervensi dan dedikasi Tiongkok untuk membela kepentingan bersama melalui kemerdekaan dan otonomi. Strategi ini sejalan dengan keinginan negara-negara Timur Tengah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan beradaptasi dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, Beijing memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan keterlibatannya dalam upaya promosi dan mediasi perdamaian selama beberapa tahun terakhir dalam beberapa konflik paling terkenal di kawasan ini, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman, negosiasi perdamaian di Afghanistan, dan tentu saja, *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Negosiasi dipilih karena posisi Tiongkok sebagai pemain non-blok yang netral di kawasan. (Eslami & Papageorgiou, 2023)

Dengan hampir separuh pasokannya berasal dari Timur Tengah, Tiongkok secara resmi mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia pada tahun 2015. (Lons et al., 2019) Tahun demi tahun, impor ini semakin meningkat. Ketergantungan Tiongkok pada minyak negara-negara Teluk telah meningkat secara signifikan; pada kuartal pertama tahun 2022, lebih dari separuh impor Tiongkok berasal dari sumber ini. Tiongkok mengimpor minyak mentah senilai \$128 miliar dari negara-negara Teluk yang dekat dengan Selat Hormuz pada tahun 2021, yang tiga kali

lebih banyak dibandingkan gabungan impor dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. (Baabood, 2023)

Andon Pavlov, analis utama untuk penyulingan dan produk minyak di Kpler, sebuah perusahaan analisis di Wina, mengklaim bahwa setengah dari impor minyak Tiongkok dan lebih dari sepertiga minyak yang dibakar di Tiongkok berasal dari Teluk Persia. Angka-angka ini berdasarkan data dari *Nytimes*. Menurut Kpler, sebuah perusahaan yang melacak ekspor minyak Iran, impor minyak Tiongkok dari Iran meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak tahun 2021–2023, dan bulan lalu, perusahaan tersebut membeli 87% ekspor minyak Iran. (VOA Indonesia, 2023a) Arab adalah negara lain yang mengekspor minyak ke Tiongkok, selain Iran. Administrasi Umum Kepabeanan melaporkan pada bulan Januari 2023 bahwa Arab Saudi mengekspor 1,75 juta barel minyak mentah per hari, atau 87,49 juta ton, ke Tiongkok pada tahun 2022. (Thea Fathanah Arbar, 2023)

Ketergantungan minyak Tiongkok ke Timur Tengah bukan tanpa alasan, ini juga ada kaitannya dengan *Belt and Road Initiative*. Teluk Persia dikenal sebagai "area fokus" bagi para perencana militer Tiongkok, menurut Departemen Pertahanan AS. Timur Tengah merupakan pusat penting bagi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok karena lokasinya yang strategis di persimpangan Asia, Eropa, dan Afrika. Selain itu, karena Beijing memelihara hubungan bilateral yang erat dengan negara-negara di kedua sisi Selat Hormuz, tidak seperti Washington, Beijing memiliki keunggulan signifikan di kawasan Teluk dalam persaingan geostrategis globalnya dengan Amerika Serikat. Tiongkok akan menjadi pemain utama dalam keamanan selat seiring dengan meningkatnya kepentingan Tiongkok di wilayah tersebut. Hal ini terkonfirmasi pada 10 Maret 2023, ketika Tiongkok memediasi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran. Upaya Beijing untuk mengurangi ketegangan di Selat Hormuz dan sekitarnya terbantu oleh hal ini. Hanya ada sedikit cara untuk melintasi selat ini, dan satu-satunya negara yang memiliki jaringan pipa yang mampu mengangkut minyak mentah ke luar Teluk adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). 76% minyak mentah dan kondensat melintasi selat pada tahun 2018 dan dijual ke pasar Asia, menurut perkiraan dari Administrasi Informasi Energi AS. Pada tahun itu, negara tujuan utama—Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura—menyumbang enam puluh lima persen dari seluruh minyak yang dikirim melalui selat tersebut. (Baabood, 2023)

Melihat kepentingan Tiongkok akan kebutuhan pasokan minyak dari Timur Tengah, maka data-data tersebut sudah cukup menunjukkan bukti yang kuat akan salah satu kepentingan Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan Palestina, yaitu untuk mengamankan pasokan minyak yang didapatkan dari aktivitas impor Timur Tengah. Tiongkok masih sangat bergantung dengan impor minyak dari Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Bayangkan apabila kawasan Timur Tengah menjadi semakin tidak stabil akibat konflik Palestina dan Israel yang

berkepanjangan, maka pasokan minyak yang dikirim ke Tiongkok pun menjadi tidak menentu juga dan akan mengganggu kebutuhan minyak Tiongkok itu sendiri.

### **Proyek Belt and Road Initiative Tiongkok di Timur Tengah**

Bagian ini akan membahas kepentingan Tiongkok untuk menjalankan proyek *Belt and Road Initiative* di Timur Tengah. Tiongkok telah memilih negara-negara Timur Tengah sebagai mitra kerja sama utamanya karena sejumlah alasan strategis. Pertama, wilayah ini kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi Tiongkok yang cepat. Kedua, Tiongkok memperluas pengaruh politik dan ekonominya di seluruh dunia, dan bagi barang-barang Tiongkok, hubungan erat dengan Timur Tengah membuka pasar yang luas. Ketiga, banyak negara Timur Tengah memandang hubungan dengan Tiongkok sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada AS sebagai akibat dari meningkatnya ketegangan antara AS dan sejumlah negara di kawasan ini, terutama setelah beberapa kebijakan AS yang kontroversial. Sejumlah negara di Timur Tengah yang berupaya mempertahankan independensi dan kedaulatannya memberikan reaksi positif terhadap kecenderungan Tiongkok yang menawarkan pendekatan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara tersebut. Selain itu, Tiongkok telah memberikan kontribusi finansial yang besar dan inisiatif infrastruktur yang menarik kepada negara-negara Timur Tengah, membantu mereka mencapai otonomi ekonomi yang lebih besar dan kemajuan infrastruktur. (Yang, 2023) Oleh karena itu, pergeseran dinamika politik dan ekonomi global serta kebutuhan negara-negara Timur Tengah untuk mendiversifikasi kemitraan internasional mereka guna memajukan kepentingannya telah berkontribusi pada keputusan mereka untuk memandang Tiongkok sebagai mitra kerja sama strategis.

Tiongkok mempunyai kepentingan ekonomi, geopolitik, dan strategis di Timur Tengah selain kepentingan energi tradisional. Pada kenyataannya, Tiongkok memiliki perjanjian dan nota kesepahaman mengenai hubungan ekonominya dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah. Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok telah mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan sejumlah organisasi regional, seperti *China-Arab States Cooperation Forum* (CASCF) pada tahun 2004 dan *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada tahun 2010. (Rahman, 2023) Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang terbesar Arab Saudi; pada tahun 2021, ekspor kerajaan tersebut ke Tiongkok bernilai lebih dari \$50 miliar. Jumlah ini mewakili lebih 18% dari total pendapatan ekspornya. Sementara itu, perdagangan bilateral mencapai 80 miliar dolar AS. Sehingga menyebabkan Amerika akan menjadi kurang dominan di Timur Tengah seiring dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok. (Yang, 2023) Selain menunjukkan bahwa kemitraan Tiongkok dan Timur Tengah terutama Arab Saudi sudah semakin menguat, nilai tawar Amerika Serikat di mata negara-negara Timur Tengah mulai menurun.

Tiongkok telah banyak berinvestasi dalam memelihara hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Timur Tengah, seperti yang terlihat dalam inisiatif diplomatiknya baru-baru ini. Tiongkok menjadi tuan rumah pada KTT Tiongkok-Arab dan Tiongkok-GCC yang pertama pada tahun 2022 menunjukkan dedikasi negara tersebut dalam mengembangkan aliansi strategis di kawasan dan memajukan pertumbuhan ekonomi di luar kepentingan energi konvensional. (DW, 2022) Semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Timur Tengah mempunyai dampak yang signifikan terhadap lanskap geopolitik kawasan dan politik dunia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok telah tumbuh secara global sebagai hasil dari upaya Tiongkok untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pasar penting di Timur Tengah.

Tiongkok berupaya memperluas kolaborasi di sejumlah bidang, tidak hanya di industri energi. Dalam hal perdagangan, Tiongkok memperluas hubungannya dengan GCC dan diperkirakan akan mengambil alih posisi UE sebagai mitra dagang bilateral utama GCC pada tahun 2020. Selain itu, UEA terus menjadi mitra dagang terbesar kedua Tiongkok, sementara mitra dagang terbesar kedua dari Tiongkok saat ini adalah Arab Saudi, dan mitra dagang non-minyak terbesar UEA secara global. Perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara GCC juga berada di urutan teratas daftar prioritas diplomatik Tiongkok. (Eslami & Papageorgiou, 2023)

*Belt and Road Initiative* menjadi proyek yang sangat penting bagi Tiongkok dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Semua keputusan pasti berpatokan pada proyek tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok itu sendiri. Ketergantungan Tiongkok pada impor energi menjadikan Timur Tengah sangat penting bagi komponen maritim BRI. Sebenarnya, sebagian besar proyek investasi BRI Tiongkok pada tahun 2021 ditujukan ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, menurut Laporan Investasi BRI Tiongkok 2021. (Wang, 2022) Negara-negara Timur Tengah meningkatkan kolaborasi mereka dengan Tiongkok pada tahun 2022, yang menyumbang sekitar 23% dari keterlibatan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok, dibandingkan dengan 16,5% pada tahun sebelumnya. Selain proyek-proyek lain di kawasan *Tianjin Economic and Technological Development Area* (TEDA) Otoritas Terusan Suez dan pengoperasian terminal pelabuhan baru di Teluk Haifa, Tiongkok telah berinvestasi di Terminal Gerbang Laut Merah, sebuah perusahaan patungan antara Dana Investasi Publik Arab Saudi dan Pelabuhan Pengiriman *China Osean Shipping Company* (COSCO) Tiongkok untuk dikembangkan. dan mengoperasikan terminal peti kemas di Pelabuhan Islam Jeddah. (Patrio Sorongan, 2023) Baik Tiongkok dan Timur Tengah sama-sama melihat peluang kerjasama untuk kemakmuran kedua belah pihak di masa yang akan mendatang, maka tidak heran ketika kedua pihak ini terus menerus meningkatkan investasinya.

Dalam mewujudkan kepentingan proyek *Belt and Road Initiative*, Tiongkok memperluas kerjasamanya di Timur Tengah dengan negara selain Arab Saudi. Salah satunya adalah Irak. Dengan kontrak konstruksi sekitar \$10,5 miliar, Irak adalah negara yang paling diuntungkan dari pendanaan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok untuk proyek infrastruktur pada tahun 2021. Tiongkok kemudian membuat rencana untuk menghabiskan \$10 miliar untuk infrastruktur di Daerah Otonomi Kurdistan Irak utara. Yang paling signifikan adalah perjanjian "Kemitraan Strategis Komprehensif" Iran-Tiongkok yang berjumlah \$400 miliar (atau 10% dari total anggaran Tiongkok untuk *Belt and Road Initiative*), yang menyerukan pengembangan bersama pelabuhan Chabahar dan terminal minyak baru di dekat perbatasan, berbatasan di selatan Selat Hormuz terdapat Pelabuhan Jask. (Eslami & Papageorgiou, 2023)

Tiongkok juga berupaya meningkatkan cakupan inisiatif digitalnya di Timur Tengah. Jalur Sutra Digital Tiongkok, tempat perusahaan-perusahaan Tiongkok menandatangani perjanjian 5G dengan negara-negara GCC, sangat bergantung pada Timur Tengah. Tiongkok dan UEA juga telah bekerja sama untuk meningkatkan strategi siber regional. Perjanjian-perjanjian ini menyangkal reputasi Tiongkok sebagai "peniru" dan membantunya menjadi kekuatan teknologi yang setara. Teknologi harus menjadi fokus utama kedua belah pihak. Meskipun Tiongkok bercita-cita menjadi negara dengan teknologi yang lebih maju dan memanfaatkan data untuk mendorong pembangunan dan transformasi ekonomi, negara-negara Timur Tengah secara progresif berupaya melakukan digitalisasi dan memperluas basis ekonomi mereka. Sebenarnya, Arab Saudi kini mendorong investasi Tiongkok di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Selain itu, Tiongkok dan Arab Saudi lebih banyak bekerja sama dalam bidang infrastruktur dan teknologi, yang membuat AS mengkhawatirkan kerja sama keamanan kedua negara. (Zaenudin, 2023)

### **Ambisi Tiongkok Menggeser Hegemoni Amerika Serikat**

Tiongkok dan Amerika Serikat sedang bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai pemegang hegemoni dunia. Persaingan tersebut dimulai dengan Perang Dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Sebagai presiden AS pada tahun 2018, Donald Trump mengambil keputusan untuk memungut bea masuk atas barang-barang Tiongkok yang menurutnya akan merugikan perekonomian AS. Tindakan tersebut kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan mengenakan tarif impor terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. Perang dagang semakin memburuk karena kedua negara terus menerapkan tarif impor satu sama lain. Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif impor terhadap barang-barang Amerika seperti kedelai, jagung, dan daging babi. Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap produk-produk Tiongkok senilai miliaran dolar,

termasuk barang-barang teknologi tinggi. (Ilham Taufani, 2023) Hal ini adalah bentuk perang dagang pertama yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Transfer teknologi yang dipaksakan dan masalah kekayaan intelektual juga menjadi katalisator perang dagang ini. Tiongkok membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa mereka mencuri rahasia dagang dan teknologi Amerika. Tiongkok setuju untuk membeli lebih banyak barang dari AS dan mengatasi kekhawatiran mengenai transfer teknologi paksa dan kekayaan intelektual setelah AS dan Tiongkok akhirnya menyetujui perjanjian perdagangan fase pertama pada tahun 2020, hampir dua tahun setelah negosiasi dimulai. (Ilham Taufani, 2023)

Baru sebentar berdamai, pandemi COVID-19 datang dan diketahui bersumber dari Tiongkok. Ini menjadi bahan tuntutan Amerika Serikat. Kedua negara sibuk menyelesaikan krisis mereka sendiri, yang diikuti dengan kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Konflik antara Rusia dan Ukraina, yang menaikkan harga pangan dan komoditas lainnya, memperburuk situasi. *The Federal Reserve* atau The Fed bank sentral Amerika memilih untuk menaikkan suku bunga untuk mengatasi hal ini dan menurunkan tingkat inflasi. (CNBC Indonesia, 2022) Pilihan ini berdampak pada perlambatan perekonomian AS, yang memungkinkan Tiongkok mengambil alih posisi AS dan memulai perang dagang baru.

Perang Dagang kini bergeser ke pembatasan pengembangan teknologi. Pada Kongres Rakyat Nasional di bulan Maret 2023, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui bahwa pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh negara lain merupakan sanksi. Sebagai tanggapan, Xi menuntut agar ilmu pengetahuan dan teknologi maju lebih cepat guna membebaskan diri dari kendala ketergantungan pada perdagangan dengan negara lain. Demi alasan keamanan nasional, Amerika Serikat membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor dan kecerdasan buatan. Tiongkok telah mengajukan gugatan terhadap AS di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membela diri. Dalam menghadapi pembatasan ekspor AS, Tiongkok mengalokasikan US\$ 140 miliar untuk meningkatkan produksi chip dalam negeri sebagai bentuk kemandirian bangsa. (Kompas.id, 2023)

Upaya perebutan hegemoni dunia sampai pada puncaknya dengan dilakukannya dedolarisasi atau penggantian penggunaan uang dolar yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam perdagangan minyak oleh Tiongkok. Langkah terbesar Tiongkok dalam menghadapi dolar adalah berhenti menggunakan mata uang AS dalam perjanjian perdagangan dengan negara lain. Tiongkok telah menyampaikan undangan untuk meninggalkan dolar AS ke Rusia, Brasil, India, Kazakhstan, Pakistan, dan Laos. Mereka setuju untuk menjalankan bisnis secara internasional menggunakan mata uang lokal, atau yuan, negara mereka masing-masing. Transaksi terbesar melibatkan Brasil. Pada akhir Maret 2023,

Tiongkok dan Brasil telah sepakat untuk mulai menggunakan yuan dalam perdagangan. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai \$150,5 miliar USD. Tiongkok juga berhati-hati dalam mencapai kesepakatan dengan negara-negara ASEAN untuk menggunakan yuan dibandingkan dolar dalam perdagangan dan investasi. Setelah dibukanya jalur kereta api Tiongkok-Laos, penggunaan yuan dalam perdagangan dengan Laos mengalami lonjakan yang signifikan. Sejak September 2021, Tiongkok dan Indonesia juga telah sepakat untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan melalui sistem penyelesaian mata uang lokal. (Ilham Taufani, 2023) Ketika dolar AS diganti dengan yuan, akan terjadi peningkatan transaksi dan permintaan terhadap yuan dan penurunan dolar AS.

Tiongkok juga berupaya untuk mendedolarisasi hubungan kerja samanya dengan negara-negara Timur Tengah. Tiongkok memperluas pengaruhnya di Timur Tengah melalui sejumlah strategi, salah satunya adalah dedolarisasi, setelah berhasil meredam ketegangan dan membina persatuan yang lebih besar antar negara di sana. Untuk membantu dedolarisasi mendapatkan daya tarik dalam agenda ekonomi global, Tiongkok menyarankan agar transaksi minyak dilakukan dalam yuan dan mendukung kesediaan Arab Saudi dan Iran untuk bergabung dengan BRICS. Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Tiongkok adalah multipolaritas, yang masih diupayakan. (Eslami & Papageorgiou, 2023) Iran dan Arab Saudi juga menandatangani kesepakatan damai untuk memulihkan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kesepakatan ini terjadi setelah didorong oleh Tiongkok. (Sorongan, 2023) Hal ini menjadikan Amerika Serikat semakin khawatir akan bergesernya hegemoni dunia ke Tiongkok.

Tiongkok juga berupaya meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah. Tiongkok telah meningkatkan penjualan senjatanya ke Timur Tengah, mempromosikan produksi senjata kooperatif dan mengadakan latihan militer dengan dua pemain utama di kawasan tersebut, Arab Saudi dan Iran. Tiongkok mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penolakan AS untuk memasok persenjataan mutakhir ke Timur Tengah dengan mengeksport rudal balistik *Dongfeng* dan *drone Wing Loong Bomber* ke sejumlah negara di kawasan. (Eslami & Papageorgiou, 2023) Ekspor ini menunjukkan bahwa Tiongkok adalah eksportir pilihan bagi negara-negara di kawasan ini karena penjualan persenjataannya ke negara-negara yang sering menjadi sasaran sanksi atau embargo internasional mematuhi prinsip non-intervensi.

Upaya Tiongkok merebut hegemoni dunia juga dilakukan dengan memanfaatkan *soft power* melalui bantuan kemanusiaan dan kebudayaan kepada negara-negara Timur Tengah. Dalam bentuk bantuan medis selama pandemi COVID-19, promosi budaya dengan penekanan pada membina ikatan komunitas—khususnya melalui pariwisata, yang akhir-akhir ini meningkat—inisiatif pendidikan melalui

kolaborasi dan pertukaran universitas, dan penciptaan institusi pendidikan bernuansa Tiongkok di Arab Saudi bernama Confucius Institute adalah beberapa contoh bantuan kemanusiaan dan budaya ini. (Wartanews, 2023) Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk meningkatkan posisi Tiongkok di kawasan dan menekankan statusnya sebagai sekutu yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

### **Membedah Peran Pemimpin Negara Tiongkok Sebagai Aktor Rasional**

Dalam membedah peran pemimpin negara Tiongkok aktor rasional dalam memberikan dukungan kemerdekaan Palestina, penulis akan menegaskan kembali definisi dari model aktor rasional itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan dan dikutip dari beberapa artikel referensi, pada dasarnya model aktor rasional adalah sebuah kerangka normatif yang digunakan untuk melakukan kajian atas pengambilan keputusan yang dilakukan dalam keadaan berisiko. Keputusan yang dikaji dengan menggunakan metode aktor rasional ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitas dengan memprioritaskan agenda kebijakan luar negeri. Utilitas sendiri dimaksudkan sebagai nilai guna. Secara sederhana, penulis dapat menyampaikan bahwa model aktor rasional akan membuat kebijakan luar negeri sebuah negara memiliki nilai guna yang tinggi atau bahkan meningkat. Apabila sebuah kebijakan luar negeri sudah memiliki nilai guna yang tinggi, maka inilah yang akan dijadikan sebagai tujuan dari pengambilan keputusan: memaksimalkan kepentingan nasional negara tersebut. Hal ini terdengar masuk akal, karena seorang aktor rasional dari sebuah negara pasti akan memprioritaskan kepentingan negaranya sendiri dalam membuat sebuah keputusan apapun. Maka, dukungan kemerdekaan yang diberikan oleh Tiongkok untuk Palestina pasti mengandung maksud dan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya. Apa saja kepentingan negara Tiongkok dalam agenda kebijakan luar negerinya?

**Pertama**, Tiongkok memiliki kebutuhan akan minyak yang sangat tinggi. Di tahun 2019 saja, impor minyak mentah Tiongkok melonjak 9,5% dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor dalam 17 tahun berturut-turut. (Rahmawati, 2020) Sadar akan kebutuhannya yang tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri, maka Tiongkok bergantung pada impor minyak. Sedangkan importir minyak terbesar Tiongkok adalah negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Iran. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya, data telah menunjukkan bahwa ketergantungan impor minyak Tiongkok dari negara-negara Timur Tengah sangat tinggi sehingga ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan nasional Tiongkok yang pertama, yaitu kebutuhan impor minyak. Akan menjadi sangat berisiko bagi Tiongkok jika Timur Tengah dalam kondisi yang sangat tidak aman karena adanya konflik Palestina-Israel karena pasokan minyaknya akan terganggu. Maka menjadi rasional bagi pemimpin negara Tiongkok untuk mendukung kemerdekaan Palestina: untuk memastikan agar kawasan Timur Tengah dalam keadaan yang stabil sehingga pasokan impor minyak dari negara-negara Timur Tengah ke

Tiongkok tidak terganggu. Dengan tidak terganggunya pasokan impor minyak tersebut, maka Tiongkok dapat memenuhi kepentingan nasionalnya akan pasokan minyak. Hal ini menjadi *win-win solution* bagi Tiongkok dan Timur Tengah.

**Kedua**, Tiongkok memiliki agenda kebijakan luar negeri yang sangat penting untuk memperluas pengaruh dan investasi perekonomiannya, yaitu *Belt and Road Initiative*. BRI adalah ambisi ekonomi internasional terbesar Tiongkok, yang bertujuan untuk merangsang pembangunan ekonomi di wilayah luas yang mencakup sub-wilayah di Asia, Eropa, dan Afrika, yang mencakup 64% populasi dunia dan 30% PDB dunia. (Huang, 2016) Kawasan Timur Tengah menjadi salah satu target investasi *Belt and Road Initiative* itu sendiri. Palestina memang bukan negara yang mendapat investasi *Belt and Road Initiative*, tetapi perlu diingat bahwa Palestina sendiri masih berada di kawasan Timur Tengah. Mengingat pentingnya *Belt and Road Initiative* ini sebagai agenda kebijakan luar negeri Tiongkok dan urgensi akan kawasan Timur Tengah sebagai target besarnya, maka dukungan kemerdekaan Palestina dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan nasional Tiongkok yang kedua: memastikan kawasan Timur Tengah tetap aman untuk menjalankan proyek *Belt and Road Initiative*. Apabila kawasan ini tidak aman, maka *Belt and Road Initiative* tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan Tiongkok akan sangat rugi karena telah meletakkan investasi besar-besaran di sana. Maka menjadi sangat rasional bagi pemimpin negara Tiongkok untuk mengambil keputusan mendukung kemerdekaan Palestina dengan memaksimalkan nilai guna kebijakan luar negerinya, karena proyek *Belt and Road Initiative* milik Tiongkok dalam resiko besar jika kawasan Timur Tengah terganggu.

**Ketiga**, Tiongkok ingin menggeser hegemoni Amerika Serikat. Setelah terlibat dalam perang dagang hingga dedolarisasi, maka kepentingan nasional Tiongkok selanjutnya adalah merebut hegemoni Amerika Serikat di dunia internasional. Mengapa ini menjadi penting? Perebutan hegemoni dilakukan untuk menaikkan citra Tiongkok di mata internasional. Setelah sukses mendamaikan Arab Saudi dan Iran, Tiongkok ingin memposisikan dirinya sebagai juru damai antara Palestina dan Israel. Jika ini berhasil, maka Tiongkok telah menancapkan kembali hegemoninya di mata dunia dengan dipandang sebagai negara yang memiliki kekuatan. Tentu ini menjadi pertimbangan rasional seorang Xi Jinping selaku Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Apa keuntungannya bagi Tiongkok? Tentu saja, nama Tiongkok di dunia internasional meningkat, negara-negara lain semakin percaya terhadap Tiongkok, dan investasi yang melibatkan Tiongkok juga akan meningkat. Tidak terlalu jauh dari poin-poin sebelumnya, keputusan Tiongkok untuk mendukung kemerdekaan Palestina semata-mata bertujuan untuk meningkatkan citra negaranya sendiri: menjadi negara hegemoni dunia mengalahkan Amerika Serikat. Tentu menjadi sangat rasional bagi pemimpin negara Tiongkok dalam mengambil

keputusan ini, karena akan banyak keuntungan yang didapatkan Tiongkok sebagai sebuah negara jika ia menjadi negara hegemoni dunia mengalahkan dominasi Amerika Serikat di dunia internasional.

Pembaca dapat melihat bahwa sebenarnya Tiongkok tidak sedang berfokus pada Palestina, atau bahkan Timur Tengah, tetapi ia fokus pada dirinya sendiri. Pemimpin negara Tiongkok melihat konflik ini justru sebagai peluang agar nama Tiongkok semakin baik di mata internasional. Setelah pandemi COVID-19 yang memang datang dari negara Tiongkok sempat membuat nama negaranya tidak baik, maka keikutsertaannya dalam mendamaikan Palestina-Israel dan kawasan Timur Tengah secara umum akan sedikit banyak memulihkan nama baik Tiongkok, bahkan menaikkan nama Tiongkok itu sendiri di mata internasional. Pembaca dapat melihat kecerdikan pemimpin negara Tiongkok dalam mengambil keputusan dalam penelitian ini, karena sebagai aktor rasional Xi Jinping benar-benar memperhitungkan segala kemungkinan yang menguntungkan negara Tiongkok dengan memaksimalkan nilai guna tiga agenda kebijakan luar negerinya: impor minyak, *Belt and Road Initiative*, dan penggeseran hegemoni dunia. Tidak ada negara yang secara *nothing to lose* mendukung negara lain, pasti ada kepentingan yang sedang mati-matian dikejarinya. Analogi tidak ada makan siang gratis pun menjadi relevan dan rasional diterapkan dalam kasus ini.

## **KESIMPULAN**

Ada tiga kepentingan Tiongkok mendukung kemerdekaan Palestina: sebagai upaya menjaga impor minyak dari negara-negara Timur Tengah, mengamankan berjalannya proyek *Belt and Road Initiative* yang menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai target utamanya, dan menggeser hegemoni dunia yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat ke tangan Tiongkok. Kepentingan ini semata-mata untuk mendukung kepentingan nasional Tiongkok itu sendiri untuk memakmurkan negaranya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari perhatian dunia yang tertuju kepada Tiongkok. Keterlibatan pemimpin negara Tiongkok sebagai aktor rasional dalam mengambil keputusan ini sangatlah terlihat. Pemimpin negara Tiongkok secara cermat dapat melihat konflik Palestina-Israel sebagai peluang untuk meningkatkan eksistensi Tiongkok itu sendiri dan mencapai kepentingan nasional negaranya untuk memenuhi pasokan minyak dan proyek *Belt and Road Initiative*. Hegemoni negara yang bergeser ke Tiongkok dapat dikatakan sebagai bonus jika semua upaya perdamaian tersebut berhasil. Maka, kita dapat melihat Palestina bukan menjadi incaran utama Tiongkok, Timur Tengahlah incaran utamanya. Timur Tengah pun bukan satu-satunya alasan, Tiongkok sendirilah alasan utamanya.

## **REFERENSI**

- Afinotan, L. A. (2014). Decision-Making on International Relations: A Theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, 10(5), 249–256. <https://doi.org/10.3968/4970>
- Alden, C. (2017). Critiques of the Rational Actor Model and Foreign Policy Decision Making. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.474>
- Baabood, A. (2023). *Why China Is Emerging as a Main Promoter of Stability in the Strait of Hormuz*. Carnegie Middle East Center. <https://carnegie-mec.org/2023/05/24/why-china-is-emerging-as-main-promoter-of-stability-in-strait-of-hormuz-pub-89829>
- Bethan McKernan. (2023, October 7). *Israel and Hamas at war after surprise attacks from Gaza Strip*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/07/hamas-launches-surprise-attack-on-israel-as-palestinian-gunmen-reported-in-south>
- Brookings Doha Center. (2019). *The Belt and Road Initiative: China-Middle East Cooperation in an Age of Geopolitical Turbulence*. Belt and Road Initiative. <https://www.brookings.edu/events/the-belt-and-road-initiative-china-middle-east-cooperation-in-an-age-of-geopolitical-turbulence/>
- Chen, J., Yang, X., Wang, M., & Su, M. (2023). Evolution of China's interaction with Middle Eastern countries under the Belt and Road Initiative. *PLoS ONE*, 18(11 November), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293426>
- CNBC Indonesia. (2022, July 11). Ini yang Bikin Hubungan China dengan AS dalam Bahaya Besar. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220711060344-4-354465/ini-yang-bikin-hubungan-china-dengan-as-dalam-bahaya-besar>
- CNN Indonesia. (2023, October 13). Putin Tegaskan Dukung Negara Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231013125121-120-1010803/putin-tegaskan-dukung-negara-palestina-dengan-ibu-kota-yerusalem>
- DW. (2022, December 9). KTT Arab-Cina Digelar di Arab Saudi. *DW*. <https://www.dw.com/id/ktt-arab-cina-digelar-di-arab-saudi/a-64040948>
- Eslami, M., & Papageorgiou, M. (2023). *China's Increasing Role in the Middle East: Implications for Regional and International Dynamics*. Georgetown Journal of International Affairs. <https://gjia.georgetown.edu/2023/06/02/chinas-increasing-role-in-the-middle-east-implications-for-regional-and-international-dynamics/>
- Frederik Kelter. (2023, November 6). China takes cautious approach to diplomacy over Israel-Gaza war. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/6/china-takes-cautious-approach-to-diplomacy-over-israel-gaza-war>
- Global Times. (2023, June 14). China, Palestine upgrade ties to 'milestone' strategic partnership. *Global Times*. <https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292561.shtml>
- Helen Davidson, & Amy Hawkins. (2023, November 9). *China has a history of being pro-Palestinian, but now faces diplomatic conundrum*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/09/china-israel-pro-palestinian-history>
- Huang, Y. (2016). Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment. *China Economic Review*, 40(2016), 314–321. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>
- Humas Setkab RI. (2023). *Indonesia Condemns Attacks in Gaza*. Setkab RI. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-condemns-israeli-attacks-on-gaza-strip/2238721>
- Ilham Taufani, M. R. (2023). Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi. *CNBC*

- Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230421165302-128-431640/membongkar-perang-dagang-as-vs-china-upaya-dedolarisasi>
- Jianli Yang. (2023, October 11). *China's Response to the Israel-Hamas Conflict Reflects Its Longstanding Support for Palestine*. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/10/chinas-response-to-the-israel-hamas-conflict-reflects-its-longstanding-support-for-palestine/>
- Kahler, M. (1998). Rationality in International Relations. *International Organization*, 52(4), 919–941. <https://doi.org/10.1162/002081898550680>
- Khaliq, R. ul. (2023, June 14). China's Xi says ready to help Palestine in achieving internal reconciliation, peace talks. *AA*. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/chinas-xi-says-ready-to-help-palestine-in-achieving-internal-reconciliation-peace-talks/2922288>
- Kompas.id. (2023, April 25). Antara China dan AS. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/25/antara-china-dan-as>
- Lons, C., Fulton, J., Al-tamimi, N., & Sun, D. (2019). *Policy Brief China's Great Game in the Middle East*. European Council on Foreign Relations.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2023). *Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the Escalation of Tensions Between Palestine and Israel*. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665401/2535\\_665405/202310/t20231008\\_11157299.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/202310/t20231008_11157299.html)
- Mordechai Chaziza. (2023, November 7). *Is China a Friend? Time for Israel to Decide*. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/11/is-china-a-friend-time-for-israel-to-decide/>
- Patrio Sorongan, T. (2023). *Bukti Terbaru "Perselingkuhan" Arab ke China, AS Dijauhkan?* *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230815133919-4-463108/bukti-terbaru-perselingkuhan-arab-ke-china-as-dijauhkan>
- Rahman, M. A. (2023, June 16). Kemitraan Arab-China Semakin Moncer. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/16/kemitraan-arab-china-semakin-moncer>
- Rahmawati, W. T. (2020). Impor minyak mentah tahunan China terus rekor dalam 17 tahun terakhir. *Investasi.Kontan.Co.Id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/impor-minyak-mentah-tahunan-china-terus-rekor-dalam-17-tahun-terakhir>
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (2002). Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. In *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. Palgrave Macmillan, New York. [https://doi.org/10.1057/9780230107526\\_2](https://doi.org/10.1057/9780230107526_2)
- Sorongan, T. P. (2023). *China Damaikan Saudi-Iran, Tanah Arab Gempar, Israel Pening!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230314072837-4-421378/china-damaikan-saudi-iran-tanah-arab-gempar-israel-pening>
- South China Morning Post. (2023, October 8). *Around 1,000 dead in Israel-Hamas war, as Lebanon's Hezbollah also launches strikes*. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3237210/hundreds-dead-israel-hamas-war-lebanons-hezbollah-launches-attacks>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.

- Syafriani, S., & Kusuma, R. P. (2019). Pencapaian Tiongkok di Timur Tengah Terkait The Silk Road Economic Belt: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Transportasi Kereta Api Terhadap Iran Periode 2013-2018. *Balcony*, 3(2), 101–113.
- The White House. (2023, October 8). *Remarks by President Biden on the Terrorist Attacks in Israel*. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/10/remarks-by-president-biden-on-the-terrorist-attacks-in-israel-2/>
- Thea Fathanah Arbar. (2023). *Rusia Minggir Dulu, Ini Dia Pemasok Minyak Terbesar ke China*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230120190357-4-407235/rusia-minggir-dulu-ini-dia-pemasok-minyak-terbesar-ke-china>
- Tommy Patrio Sorongan. (2023, November 6). *Diplomasi Senyap ala China dalam Perang Hamas Vs Israel*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106145126-4-486737/diplomasi-senyap-ala-china-dalam-perang-hamas-vs-israel>
- VOA Indonesia. (2023a). *Suplai Minyak Iran yang Melimpah dan Murah Batasi Harga Minyak Rusia di China*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/suplai-minyak-iran-yang-melimpah-dan-murah-batasi-harga-minyak-rusia-di-china-/7242211.html>
- VOA Indonesia. (2023b, October 9). *PM Inggris Sunak Tegaskan Dukungan untuk Israel*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/pm-inggris-sunak-tegaskan-dukungan-untuk-israel-/7302605.html>
- Wang, C. N. (2022). China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2021. In *Green BRI Center, International Institute of Green Finance (IIGF)* (Vol. 9, Issue 5).
- Wartanews. (2023, June 6). Arab Saudi buka Institut Konfusius pertama. *Wartanews*.
- Yang, W. (2023). *Pengaruh Cina di Timur Tengah Meningkat*. DW. <https://www.dw.com/id/pengaruh-cina-di-timur-tengah-meningkat/a-65003091>
- Ynet News. (2023, October 7). *Dozens killed, abducted as Israel comes under surprise Hamas attack*. Ynetnews.Com. <https://www.ynetnews.com/article/rysg8i0l6>
- Zack Beauchamp. (2023, October 7). *Why did Hamas invade Israel?*. Vox.Com. <https://www.vox.com/2023/10/7/23907323/israel-war-hamas-attack-explained-southern-israel-gaza>
- Zaenudin, A. (2023). *Jalur Sutra Baru dan Upaya Cina "Mengamankan" Timur Tengah*. Tirto.Id.